

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 10

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Dewan Wajib Mengawasi Anggaran Covid-19

SAMPIT-Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 menjadi dasar rasionalisasi anggaran yang sedang dijalani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim).

Anggota DPRD Kotim Muhammad Arsyad mengatakan rasional-

isasi anggaran itu sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Pasalnya, sikap dewan yang mempertanyakan rasionalisasi anggaran Sekretariat Daerah (Sekda) pada Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai Rp11,3 Miliar dipandang seolah-olah lembaga legislatif ini menolak.

"Kami hanya ingin meminta penjelasan karena selama ini rasionalisasi itu terkesan dilakukan tiba-tiba tanpa penjelasan atau

informasi terlebih dahulu. Hal itu demi transparansi anggaran dan bentuk pengawasan yang dilakukan dewan. Apalagi dewan merupakan mitra yang sejajar dengan pihak eksekutif sehingga sudah selayaknya ada etika komunikasi yang baik," ujarnya, Rabu (29/4).

Menurut Arsyad, dalam melakukan rasionalisasi pemerintah daerah jangan selalu berlindung di balik penanganan virus Corona

atau Covid-19 dan surat keputusan bersama (SKB). Justru, ujarnya, mekanisme dan etika harus dijalankan atau diutamakan, karena dewan berkewajiban untuk tetap mengawasi penggunaan anggaran.

"DPRD tetap mempunyai hak dan berkewajiban mengawasi penggunaan dana penanganan virus Corona, karena saat ini DPRD dalam budgeting memang seakan diamputasi dalam hal dana pen-

anganan virus Corona, karena tidak diharuskan dibahas dengan DPRD, tapi pengawasannya tetap harus ada," terangnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan pemerintah daerah seharusnya melakukan koordinasi dengan pihak DPRD sebelum melakukan rasionalisasi anggaran itu, sehingga ada kesepakatan bersama. Masalah ini, ujarnya, harus ditanggulangi bersama pula,

sehingga proses dan penggunaan anggaran harus dilakukan dengan baik sesuai aturan. Tujuannya, agar tidak sampai terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

"Kami menegaskan bahwa DPRD tidak ada niat untuk menghambat. Justru kami DPRD ingin mengawal agar penanganan Covid-19 ini bisa maksimal, agar tidak ada penyimpangan dan pelanggaran aturan hukum," tutupnya. **(bah/ila)**